

BAB III
PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NELAYAN DI KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2014-2016

A. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Meningkatkan Perekonomian Nelayan di Kabupaten Natuna.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Berdasarkan Peraturan ini Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berjalannya tata laksana dan tata kerja kedinasan maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok yang diemban Dinas Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan dan melaksanakan Kewenangan Otonomi dibidang Kelautan dan Perikanan.

Seperti wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Natuna Ir.Wahyu Nugroho, MA pada tanggal 25 September 2017 adalah sebagai berikut:

”Dinas perikanan sebagai perantara dalam aspek operasional perizinan dan pemberian kebijakan terkait pengadaan bantuan yang diberikan pemerintah pusat.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Kabid Produksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Dedy Damhudy, S.IP, M.Si pada tanggal 25 September 2017, Menyatakan sebagai berikut:

”Dinas Perikanan berperan dalam sarana produksi yang dibutuhkan masyarakat nelayan. Pemberian bantuan sarana operasional, pembinaan kelompok nelayan, pembangunan tempat pelelangan ikan dan peningkatan pasca panen nelayan.”

Hasil wawancara tersebut didukung dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Seorang Nelayan Bapak Mustafa pada tanggal 30 September 2017, hasil wawancara nelayan menyatakan:

”Usaha yang dijalankan nelayan selama ini sudah melalui perizinan Dinas Kelautan dan Perikanan. Usaha yang dimaksudkan seperti usaha budidaya ikan hidup, rumput laut dan pengolahan hasil tangkap. Selain itu nelayan memperoleh bantuan operasional dari pemerintah pusat yang diperantarai oleh pemerintah daerah. Bantuan operasional yang diberikan dalam hal ini seperti jaring sebagai alat tangkap untuk nelayan dan bantuan kapal yang diberikan setiap KUB (Kelompok Unit Bersama).”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perikanan yaitu sebagai perantara bantuan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian nelayan. Selain itu Dinas Perikanan berperan aktif dalam memberikan izin terhadap usaha yang dijalankan nelayan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;

3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan pengelolaan Plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan sebagai berikut;
2. Pemberian izin usaha dan pengawasan pembudidayaan, pembenihan, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut serta pembinaan terhadap penangkapan ikan;
3. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
4. Penetapan kebijakan dan pengawasan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten;
5. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan daerah Kabupaten;
6. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
7. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
8. Pembinaan pemukiman nelayan;
9. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana Perikanan;
10. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
11. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil Perikanan;
12. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang lingkup Kabupaten dan pulau-pulau kecil;

13. Pemberian izin pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut wilayah lingkup kewenangan Kabupaten;
14. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
16. Penyusunan Rencana Bidang Kelautan dan Perikanan;
17. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan Sumberdaya Alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) Mil;
18. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Perizinan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. Penyelenggaraan Ekspor Impor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak berisiko tinggi;
22. Penyelenggaraan sistem Kelautan dan Perikanan;
23. Penyelenggaraan promosi Kelautan dan Perikanan;
24. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
25. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang Kelautan dan Perikanan;

26. Pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap *Illegal Fishing*.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dalam menjalankan perannya telah melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan kewenangan yang telah di berikan dalam meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna, adapun kegiatan tersebut yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna memberikan perizinan kepada masyarakat Nelayan untuk izin usaha dan pengangkutan ikan di darat maupun perairan laut serta pembinaan terhadap penangkapan ikan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Menjalankan kegiatan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut yang berfungsi untuk menjaga kestabilan produksi ikan dan kebersihan laut tetap terjaga.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Memberikan izin dan pengawasan pemasangan rumpon oleh nelayan di wilayah perairan kewenangan daerah Kabupaten.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Melakukan Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan dan pangkalan pendaratan ikan yang bekerja sama dengan Kementerian.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Memberikan izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil Perikanan;

6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna menjalankan penyelenggaraan Ekspor Impor hasil tangkap sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna menjalankan kegiatan pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap *Illegal Fishing*, dengan mengadakan patroli laut dengan bekerja sama dengan aparat daerah.

B. Tantangan dan Peluang Dinas Kelautan dan Perikanan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna dalam pengembangan pelayanan serta melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi, yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah yang cukup sulit;
2. Terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan;
3. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum;
4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum terpadu;
5. Posisi wilayah di daerah perbatasan dan lintasan perdagangan Internasional.

Sementara dilihat dari peluang yang dapat diupayakan serta di optimalkan untuk mengembangkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi:

1. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam mengelola wilayah sendiri;
2. Tingginya permintaan pasar terhadap komoditi perikanan;
3. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan;
4. Investasi dari investor luar daerah;
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
6. Menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Kesatuan visi dan misi dalam pembangunan perikanan memang memerlukan suatu proses yang memakan waktu lama tapi sangatlah diperlukan agar tercapainya kesinambungan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat nelayan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

Tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan Misi, tujuan juga merupakan dari hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang lama 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Adanya tujuan maka tingkat fokus serta konsentrasi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih di pertajam guna memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai secara optimal.

Berdasarkan dari penetapan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan usaha pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal dan lestari;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang perikanan dan kelautan;
3. Menurunkan Illegal Fishing;
4. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat perikanan.

Sasaran adalah penjabaran serta penjelasan dari tujuan secara terukur yang mengenai hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Adapun Sasaran strategis yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna yaitu:

1. Terwujudnya Sentra-sentra Ekonomi Rakyat;
2. Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah;
3. Terjaminnya Distribusi dan Pemasaran Hasil Pengelolaan Industri;
4. Terciptanya Aktivitas Pembangunan Yang Sesuai Dengan Potensi dan Karakteristik Wilayah;
5. Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah.

D. Realisasi Program, Kegiatan dan Alokasi Dana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2016

Rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2014-2016 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Sasaran, Program, Kegiatan dan Realisasi Anggaran Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2013-2016

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Sasaran	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2013	4	13	36	26,237,089,078.00	23,349,885,764.00
2	2014	5	10	31	21,869,950,975.00	19,715,975,293.00
3	2015	3	11	28	14,633,223,603.00	11,277,613,403.00
4	2016	3	8	20	26,120,264,400.00	24,793,069,539.00

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel 3.1 menunjukkan ada beberapa program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dengan alokasi dana APBD dan APBN untuk setiap tahunnya terjadi fluktuasi. Ini juga menunjukkan ada beberapa program kerja yang harus mengalami penundaan seiring dengan adanya perubahan anggaran. Namun ada beberapa program kerja yang tetap dipertahankan dengan beberapa pertimbangan, adanya dukungan dari *stakeholder* yang terkait seperti:

1. Pemerintah Kabupaten Natuna, memberikan beberapa kemudahan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dalam bentuk alokasi dana yang memadai untuk tetap dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Pusat, memberikan dukungan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memberikan alokasi dana yang memadai. Banyak program yang diluncurkan dalam usaha memajukan sektor kelautan dan perikanan seperti dengan meluncurkan program PSKPT (Pembangunan

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu). Dukungan tersebut diwujudkan sebagai upaya program dengan membangun pelabuhan, program peningkatan hasil perikanan melalui peningkatan perekonomian masyarakat nelayan dengan program penerbitan kartu nelayan serta pemberian asuransi nelayan bagi kalangan nelayan dengan tujuan agar memberikan ketenangan bagi nelayan dan keluarganya.

3. Pendampingan oleh Penyuluh, memberikan dukungan berupa pendampingan bagi masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah perikanan. Aktivitas para penyuluh sehari-hari dengan terus memberikan pendampingan ke masyarakat di lapangan sehingga ini sangat membantu dalam meningkatkan usaha perekonomian di sector pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Selain pendampingan usaha bagi masyarakat nelayan dalam menjalin komunikasi dengan pihak-pihak tertentu seperti instansi pemerintahan dan dunia usaha.

E. Realisasi Program dan Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2016

A. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2014 telah menetapkan 3 (tiga) program, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran Beserta Target dan Realisasi Pada Tahun 2014

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Targ et	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	a. Meningkatkan Hasil Produksi Perikanan	%	85	85	100,00
	b. Meningkatkan hasil produksi perikanan	%	90	90	100,00
2.	a. Meningkatkan Hasil Produksi Tangkapan	%	80	80	100,00
	b. Meningkatkan Hasil Produksi Tangkapan	%	90	90	100,00
	c. Tersedianya Dokumen DED Pelabuhan	Dokumen	1	1	100,00
	d. Tersedianya Dokumen UKL-UPL Pelabuhan	Dokumen	1	1	100,00
	e. Meningkatnya Hasil Produksin Perikanan	%	75	75	100,00
3.	a. Meningkatnya Pemasaran Produk Hasil Perikanan	%	80	80	100,00

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna

Dari tabel di atas terlihat bahwa 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi Indikator Kinerja Sasaran mencapai 100%. Adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 11.755.089.375,- atau 53,75% dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 21.869.750.975,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.10.921.496.960,- atau 92,91% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2014 telah menetapkan 2 (dua) program, yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
- 2) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran Beserta Target dan Realisasi Pada Tahun 2014

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	a. Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Secara Optimal	%	90	90	100,00
	b. Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Secara Optimal	%	70	70	100,00
	c. Menurunnya Ilegal fishing	%	95	95	100,00
2.	a. Meningkatnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Terumbu Karang	%	70	70	100,00

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna

Dari tabel di atas terlihat bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi mencapai 100%. Adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.2.464.373.000,- atau 11,27% dari anggaran belanja langsung

sebesar Rp.21.869.750.975,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.463.186.530,- atau 59,37% dari jumlah anggaran yang tersedia.

B. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2015 telah menetapkan 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
2. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Sasaran Beserta Target dan Realisasi Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir		70	70	100,00
	b. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir		80	80	100,00
	c. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir		80	80	100,00
2.	a. Meningkatnya Hasil Perikanan dan Pengolahan Perikanan	POKHLASAR	5	5	100,00

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna

Dari table di atas terlihat bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi 100%. Adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.037.046.600,- atau 18,46% dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 21.869.750.975,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.866.966.816,- atau 95,79% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2014 telah menetapkan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Sasaran Beserta Target dan Realisasi Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	a. Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan	%	85	85	100,00
	b. Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan	%	95	95	100,00
2.	a. Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan Tangkap	%	80	80	100,00
	b. Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan Tangkap	%	90	90	100,00
	c. Tersedianya Dokumen DED Pelabuhan	Dokumen	1	1	100,00
	d. Tersedianya Dokumen UKL-UPL Pelabuhan	Dokumen	1	1	100,00
	e. Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan	%	75	74	100,00
3.	a. Meningkatnya Pemasaran Produk Hasil Perikanan	%	80	80	100,00

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna

Dari tabel di atas terlihat bahwa 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi Indikator Kinerja Sasaran 100%. Adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 11.755.089.375,- atau 53,75% dari anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 21.869.750.975,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.921.496.960,- atau 92,91% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2014 telah menetapkan 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Indikator Kinerja Sasaran Beserta Target dan Realisasi Pada Tahun 2015

No (1)	Indikator Kinerja Sasaran (2)	Satuan (3)	Target (4)	Realisasi (5)	% (6)
1.	a. Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Secara Optimal	%	90	90	100,00
	b. Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Secara Optimal	%	70	70	100,00
	c. Menurunnya Illegal fishing	%	95	95	100,00
2.	a. Meningkatnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Terumbu Karang	%	70	70	100,00

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna

Dari tabel di atas terlihat bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi mencapai 100%. Adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.2.464.373.000,- atau 11,27% dari anggaran belanja langsung

sebesar Rp.21.869.750.975,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.463.186.530,- atau 59,37% dari jumlah anggaran yang tersedia.

C. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2016

telah menetapkan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Indikator Kinerja Sasaran Beserta Target dan Realisasi Pada Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Produktifitas Sektor Kelautan dan Perikanan	Ton	52.941,62	81.382,51	153,72
2.	Hasil Tangkapan Dalam Setiap Upaya Penangkapan	Ton	51.541,62	65.180,34	126,46
3.	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.400	16.202,17	1.157,30

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dimana Produktifitas Sektor Kelautan dan Perikanan sebesar 153,72 % , Hasil Tangkapan Dalam Setiap Upaya Penangkapan sebesar 126,46 % dan Produksi perikanan budidaya sebesar

1.157,30 %. Data tersebut merupakan laporan produksi dari setiap UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan dimana nelayan dan pembudidaya ketika akan melakukan penjualan hasil tangkapan dan budidayanya melaporkan kepada UPTD, selain itu UPTD melakukan pengumpulan data dengan mendatangi tempat-tempat penjualan hasil nelayan dan pembudidaya.

Pembandingan yang dilakukan antara realisasi dengan target menunjukkan bahwa semua target dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini didapat melalui kerjasama yang baik dari semua pihak (stakeholder) yang terkait sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang kelautan dan perikanan berjalan dengan baik memberikan hasil baik dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun produktivitas perikanan secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan persentase realisasi yang dicapai berada di atas 100 %. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2016 telah menetapkan anggaran setiap program dan kegiatan. Adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 23.222.164.500,- atau 88,90 % dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 26.120.264.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.939.358.465,- atau 94,48 % dari jumlah anggaran yang tersedia.

1. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Adapun capaian indikator kinerja olahan produk sasaran beserta target dan realisasinya, yaitu:

Tabel 3.8

Indikator Kinerja Sasaran Beserta Target dan Realisasi Pada Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	112	93,11	83,13

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna

Dari tabel di atas terlihat bahwa 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dengan baik dimana Volume Produk Olahan Hasil Perikanan sebesar 83,13 %. Data tersebut merupakan laporan produksi dari setiap UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan dimana pengolah hasil perikanan setiap akan melakukan penjualan melaporkan kepada UPTD selain itu UPTD melakukan pengumpulan data dengan mendatangi tempat-tempat penjualan pengolahan hasil perikanan.

Hasil yang dicapai terlihat cukup baik dari target yang diinginkan pada indikator kinerja tentang volume produk olahan hasil perikanan. Hal ini didapat melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pembentukan kelompok – kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan yang digagas oleh pemerintah turut mendukung tercapainya realisasi.

F. Analisis Program, Kegiatan dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2016

Mengacu pada hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk analisis dapat dijabarkan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Analisis Program dan Kegiatan Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2016.

Program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna untuk tahun 2014-2016 terkait dengan misi yang diemban memang terus menurun, dimana pada tahun 2013 program dan kegiatan dilaksanakan cukup banyak yaitu 13 untuk program dan 36 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.26.237.089.078,00 sementara realisasi anggaran sebesar Rp.23.349.885.764,00. Tahun 2014 dengan 10 program dan 31 kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.869.950.975,00 sementara realisasi anggaran sebesar Rp.19.715.975.293,00. Tahun 2015 dengan 11 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.633.223.603,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.277.613.403,00. Sementara tahun 2016 dengan 8 program dan 20 kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.120.264.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.24.793.069.539,00.

Ini menunjukkan bahwa untuk setiap tahunnya terjadi penurunan program dan kegiatan tetapi tahun terakhir terjadi kenaikan alokasi

anggaran yang cukup memadai dalam melaksanakan setiap program kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu juga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna juga memperoleh dukungan yang sangat baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan meluncuran beberapa program kerja yang secara langsung dapat dinikmati oleh para masyarakat nelayan.

Sementara peran Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai fasilitator pendukung dalam proses mendukung dari program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sejak beberapa tahun ini. Ini juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sebagai pelaksana teknis dari bidang kelautan dan perikanan ini.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, bahwa telah dicanangkan beberapa program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh ke masyarakat nelayan. Program dan kegiatan yang dilakukan yaitu dengan memberikan fasilitas pendukung dari usaha nelayan seperti pengadaan alat tangkap ikan dan petugas pendampingan yang ahli dibidang kelautan dan perikanan.

Upaya yang dilakukan selama ini memang tidak luput dari adanya bantuan program dan kegiatan dari pihak Kementerian Kelautan

dan Perikanan Republik Indonesia, dimana telah memberikan bantuan kapal tangkap ikan dengan ukuran dari 2-30 GT (*gross ton*). Bantuan yang diberikan selama ini tetap melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sebagai fasilitator lapangan dan diberikan kewenangan untuk mencari dan menetapkan kelompok nelayan yang sesuai untuk menerima program bantuan kapal tangkap ikan yang diberikan agar segala fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para kelompok nelayan dalam upaya meningkatkan perekonomian nelayan. Program bantuan yang diberikan selama ini, kadang menjadi kendala dalam pengoperasionalan dan karakteristik nelayan lokal sendiri, Dimana biaya operasional dari kapal tangkap yang ukuran 30 GT membutuhkan biaya operasional yang cukup banyak dalam permodalan awal.

Selain itu juga karakteristik nelayan lokal (nelayan natuna), bekerja dengan berkelompok dalam satu kapal yang ukuran 30 GT membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah, dimana selama ini mereka bekerja (melaut) hanya 2-4 orang saja dalam satu kapal dan mereka pergi melaut hanya 1-4 hari dalam satu trip perjalanan mencari ikan di laut sehingga dalam hal ini membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah dalam pelaksanaannya. Upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, dengan memberikan pemahaman dan pendampingan yang intens dan lebih menyentuh kepada upaya mereka para kelompok nelayan agar mampu

meningkatkan perekonomiannya dengan bekerja dengan pola yang lebih modern dan menghasilkan jumlah tangkapan yang sedikit atau lebih banyak dibandingkan dengan pola kerja tangkapan ikan mereka lakukan selama ini.

Kendala lain yang dirasakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna selama ini juga, kelompok nelayan Natuna lebih bersifat menunggu waktu yang tepat daripada proaktif dalam mencari informasi, dimana ikan mudah untuk ditangkap dengan mempergunakan fasilitas pendukung yang mereka miliki selama ini melalui beberapa bantuan alat pendukung kerja mereka seperti GPS, radar ikan dan alat tangkap yang sedikit lebih modern dibandingkan dengan model dan alat tangkap mereka sebelumnya yang sedikit lebih tradisional.

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna selama ini memang sudah cukup bagus walaupun masih ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan terus dipantau perkembangannya, yaitu permasalahan dalam pemasaran produk ikan yang selama ini belum begitu langsung diterima hasilnya oleh kalangan masyarakat nelayan. Volume hasil tangkapan nelayan yang melimpah sementara tidak diimbangi dengan pengolahan hasil tangkapan yang tidak seimbang akan menyebabkan kerugian dalam hal pemanfaatan hasil tangkapan sehingga perlu menjadi perhatian pihak-pihak terkait.

Program bantuan alat pengolahan hasil tangkapan nelayan selama ini hanya berskala kecil dan hanya menampung volume hasil tangkapan yang sedikit. Adanya program pembangunan Tempat Pelelangan Ikan yang berskala besar di Natuna akan mampu menjawab semua permasalahan yang dialami oleh kelompok nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka selama ini.

2. Analisis Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2016.

Kebijakan dalam mendukung tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana dibidang kelautan dan perikanan, tentunya merumuskan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan dengan memberikan izin dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan serta dalam pengelolaan penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dengan berupaya menyediakan dana yang memadai dalam bentuk pengelolaan yang mengedepankan upaya pencapaian sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Dukungan pendanaan yang memadai serta aturan yang tepat sarannya akan mampu untuk mencapainya. Untuk tahun 2016 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam mengukur kinerja SKPD meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realities dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang yang

ditetapkan. Disamping itu juga, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna membandingkan indikator-indikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi untuk setiap tahunnya sebagai acuan untuk menetapkan sasaran tahun berikutnya. Kebijakan lain yang dianggap populer selama ini belum begitu dirasakan oleh kelompok nelayan, yaitu dengan memberikan beberapa bantuan alat tangkap dan alat bantu tangkap bagi nelayan natuna selama ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat nelayan sehingga alat yang diberikan selama ini lebih banyak menjadi pelengkap saja tapi tidak menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian nelayan secara khususnya.

Ini perlu menjadi dasar pertimbangan bagi nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang kelautan dan perikanan. Upaya dalam peningkatan perekonomian masyarakat nelayan memang perlu dilakukan selektivitas dalam pelaksanaannya agar program bantuan yang diberikan selama ini menjadi lebih tepat sarannya sehingga hasil yang ingin dicapai (outcome) dapat terus meningkat setiap tahunnya.

G. Pembahasan

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, Nelayan Natuna mendapatkan bagian 60 kapal ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun sementara baru 8 (Delapan) kapal yang di datangkan dan di operasikan. Adapun hasil tangkapan yang diperoleh dari nelayan

mengalami peningkatan yang cukup signifikan kurang lebih bisa menghasilkan 350 Kg ikan dalam sekali proses penangkapan menjadi 650 Kg, hal ini dikarenakan kapal yang di berikan kepada nelayan mempunyai kapasitas yang cukup besar.

Ada beberapa aspek yang didapati dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna maupun dari kelompok nelayan baik itu yang mendukung proses nelayan itu sendiri maupun yang menjadi hambatan, dibawah ini terdapat kelebihan maupun kekurangan yang didapati, yaitu:

Kelebihan:

1. Kapal bantuan yang di berikan kepada Nelayan berkapasitas lebih besar sehingga bisa mendapatkan hasil tangkapan meningkat;
2. Alat tangkap yang lebih moderen, sehingga hasil tangkapan ikan nelayan meningkat;
3. Hasil tangkapan di olah menjadi kuliner khas Kabupaten Natuna;
4. Hasil olahan tangkapan nelayan di perjual belikan kepada para wisatawan, maupun masyarakat lokal.

Kekurangan:

1. Kapal yang di berikan kepada nelayan tidak sesuai dengan karakter dari kelompok nelayan, hal ini karenakan para nelayan masih melakukan proses penangkapan ikan yang secara perorangan, tidak berkelompok;
2. Biaya operasional yang masih mahal bagi para nelayan;

3. Hasil tangkapan nelayan dibelikan oleh masyarakat lokal saja;
4. Hasil olahan tangkapan ikan masih di perjual belikan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung saja; dan
5. Hasil tangkap yang besar sehingga nilai jual yang rendah.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, Pemerintah seharusnya lebih memperbanyak program-program penyuluhan ke sertiap daerah di Kabupaten Natuna dalam penggunaan alat tangkap moderen dan kapal yang telah diberikan kepada nelayan, dikarenakan masyarakat nelayan yang biasanya melakukan proses penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tradisional harus beradaptasi dengan alat tangkap moderen, seperti kapal jaring tangkap yang lebih moderen, dan kapal yang berukuran lebih besar.

Hasil tangkapan nelayan yang besar berdampak pada nilai jual yang rendah, dikarenakan hasil tangkapan ikan diperjual-belikan kepada masyarakat lokal saja serta olahan tangkapan khas Kabupaten Natuna seperti: kerupuk ikan, kerupuk atom, kernas, lempar ikan, dan yang lainnya hanya di perjual-belikan kepada masyarakat lokal atau wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Kabupaten Natuna saja.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2014-2016 telah berupaya menunjukkan rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai SKPD selama ini menunjukkan hasil kinerja yang baik. Ini dilihat dari hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam 4 (empat) tahun, telah

menunjukkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari tahun 2013-2016 telah menunjukkan suatu hal yang cukup bagus, walaupun masih ada beberapa program dan kegiatan yang kadang-kadang sering muncul dan menghilang seiring dengan adanya perubahan alokasi anggaran yang ditetapkan. Pendorong dalam program dan kegiatan yang tidak dapat disejalankan akan menempuh jalur yang lebih tinggi yaitu melalui program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sering memunculkan program sejenis sebagai pengganti dari adanya beberapa program yang terpaksa dihilangkan sementara waktu dalam tahun tersebut.

Adanya beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna yang terintegrasi dengan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai antisipasi dengan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terkait dengan terjadinya defisit anggaran. Perubahan kebijakan terkait dengan anggaran, perlu adanya program pendampingan terhadap nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ini menunjukkan adanya beberapa tindakan komunikasi terjalin dengan baik antara stakeholder terkait dengan pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan. Adanya variasi dalam menetapkan sasaran juga dirasakan

perlu untuk dipertimbangkan karena pihak tertentu akan menilai kinerja SKPD akan menjadi menurunkan tingkat kepercayaan pada stakeholder terkait. Sehingga nelayan dalam hal ini yang paling merasakan dampak yang paling cepat dan bahkan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan lagi terhadap program dan kegiatan yang sering dikategorikan tidak populer.

Secara umum sasaran yang tepat akan mampu mempengaruhi setiap *stakeholder* dalam membaca peluang yang ada sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah kongkrit dalam meningkatkan perekonomian dalam bidang kelautan dan perikanan. Adanya komitmen bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan mampu untuk menjawab tantangan dan peluang yang akan diraih ke depannya.

Tersedianya anggaran yang memadai dan sumber daya manusia mumpuni juga akan menunjukkan hasil kinerja yang baik, baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan hasil yang akan dicapai. Selain itu juga upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan yang ada di Natuna perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan adanya program bantuan alat tangkap dan alat bantu tangkap yang selama ini telah disalurkan ke kelompok nelayan agar lebih selektifitas, agar sasaran yang ingin dicapai lebih tepat menjangkau ke kelompok yang lebih produktif dengan volume hasil tangkapan yang terus meningkat. Ini akan mampu mendorong pola pikir nelayan yang lebih modern dalam mengikuti

adanya perubahan baik dalam penggunaan alat tangkap maupun pola tangkap mereka yang lebih efisien dan efektif dalam menggunakannya.

Upaya dalam mempengaruhi program kerja agar menjadi lebih baik, tentunya memerlukan suatu strategi yang ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (*internal*) meliputi faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) maupun dari luar (*external*) yaitu faktor peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Segala sesuatu yang dipandang sebagai kekuatan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna yang ditinjau dari aspek kepentingan seluruh stakeholder pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1). Wilayah laut Kabupaten Natuna yang sangat luas (98,98%);
- 2). Potensi sumberdaya alam sektor perikanan yang cukup besar;
- 3). Potensi sumberdaya manusia (nelayan) tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
- 4). Kemampuan keuangan daerah cukup memadai;
- 5). Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang cukup baik.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Adapun kelemahan sebagai sisi negatif yang ada di lingkungan strategic pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat diperbaiki sebagai berikut:

- 1). Aturan hukum bidang kelautan dan perikanan (perda) masih kurang;
- 2). Kewenangan pusat di daerah masih besar (perizinan);
- 3). Ketersediaan data dan informasi pemanfaatan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan masih terbatas;
- 4). Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (TPI, Pelabuhan, Pabrik Es, Pangkalan BBM dan lain-lain) masih kurang;
- 5). Bimbingan teknis, bantuan modal usaha dan kelembagaan nelayan masih kurang.

3. Peluang (*Opportunities*)

Adapun peluang atau kesempatan yang baik untuk meminimalisir kelemahan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, yaitu:

- 1). Otonomi daerah memberikan izin bagi daerah dalam pengelolaan wilayah sendiri;
- 2). Tingginya permintaan pasar terhadap komoditi perikanan;
- 3). Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan;
- 4). Investasi dari investor luar daerah;

- 5). Meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - 6). Menyerap tenaga kerja yang tinggi.
4. Ancaman (*Treats*)

Adanya pengaruh dari luar yang dapat menimbulkan dampak negative sehingga menjadi ancaman, yaitu:

- 1). Kondisi geografis wilayah yang sulit;
- 2). Terjadinya illegal fishing dan konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- 3). Lemahnya pengawasan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum terpadu;
- 4). Posisi wilayah di daerah perbatasan dan lintasan perdagangan Internasional.

Berdasarkan analisa SWOT diatas, dapat disusun suatu formulasi strategis dengan menginteraksikan faktor-faktor internal yang menjadi faktor penentu keberhasilannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Meningkatkan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efektif, efisien, berkelanjutan dan lestari.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada bidang kelautan dan perikanan, dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan *good governance*;
3. Penyusunan data base dan sistem informasi kelautan dan perikanan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;

5. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan analisa diatas, maka strategi yang dapat diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada tahun 2014-2016, yaitu:

1. Strategi Internal

STRATEGI SO		STRATEGI ST	
1	Pengembangan industri perikanan yang lebih mendorong penciptaan lapangan kerja;	1	Penegakan hukum dan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2	Pembangunan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal dan lestari;	2	Peningkatan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3	Meningkatkan pola kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;	3	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara terpadu
4	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur	4	Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
5	Meningkatkan peluang usaha dan iklim Investasi sektor Kelautan dan Perikanan	5	Penambahan jumlah PPNS Perikanan Kabupaten Natuna.
6	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana produksi pengelolaan hasil perikanan		
7	Peningkatan bantuan pinjaman modal usaha bagi nelayan		

Sumber: Renstra DKP Tahun 2011-2016, 2016

2. Strategi Eksternal

STRATEGI WO		STRATEGI WT	
1	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor Kelautan dan Perikanan;	1	Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) bidang Kelautan dan Perikanan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
2	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam;	2	Peningkatan persediaan sarana dan prasarana produksi dan pengelolaan hasil perikanan;
3	Peningkatan penyediaan data dan informasi sektor Kelautan dan Perikanan	3	Memacu pengembangan ekonomi masyarakat nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4	Peningkatan kemampuan teknis dan modal usaha nelayan (masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil);	4	Mendorong pertumbuhan sentra produksi Kelautan dan Perikanan;
5	Peningkatan peran serta masyarakat (nelayan) dalam bidang pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.	5	Sinkronisasi program Kelautan dan Perikanan di tingkatan Provinsi maupun tingkat pusat.

Sumber: Renstra DKP Tahun 2011-2016, 2016

Pencapaian program kerja yang telah dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna selama beberapa tahun ini dapat terlihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahunan Pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2013-2016

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Sasaran	Jumlah Program	Jumlah Keiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2013	4	13	36	26,237,089,078.00	23,349,885,764.00	2,887,203,314.00	89,00
2	2014	5	10	31	21,869,950,975.00	19,715,975,293.00	2,153,975,682.00	90,15
3	2015	3	11	28	14,633,223,603.00	11,227,613,403.00	3,355,610,200.00	77,07
4	2016	3	8	20	26,120,264,400.00	24,793,069,539.00	1,327,194,816.00	94,92

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel 3.9 menunjukkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013-2014, terjadi kenaikan, walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan yang diakibatkan oleh berkurangnya alokasi anggaran yang disebabkan oleh defisitnya APBD Natuna pada saat itu.

Alokasi anggaran yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 26.120.264.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.793.069.539,00 dengan capaian kinerja mencapai angka yang cukup memuaskan, yaitu 94,92% dengan predikat penilaian “MEMUASKAN”.

Selain itu juga didukung dengan 3 sasaran untuk beberapa misi yang dikatakan menunjukkan adanya komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari kepala dinas maupun dukungan staf/pegawai.

Alokasi anggaran yang telah dialokasi, jika dikaitkan dengan misi dan sasaran yang dicapai menurut misi dan sasaran tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.10

**Capaian Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2014**

MISI	TUJUAN	SASARAN	CAPAIAN KERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI PERTAMA	Tujuan 1	Meningkatkan Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan	95,79
Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan tangkap Secara Optimal dan	Terwujudnya Sentra-sentra Ekonomi Rakyat		
MISI KEDUA	Tujuan 2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan	92,62
Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hasil Perikanan	Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah		
	Terjaminnya Distribusi dan Pemasaran Hasil Pengelolaan Industri		
MISI KETIGA	Tujuan 3	Menurunkan Ilegal Fishing	59,37
Penegakan Supermasi Hukum Bidang Perikanan	Terciptanya aktifitas Pembangunan yang Sesuai dengan Potensi dan Karakteristik		
MISI KEEMPAT	Tujuan 4	Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Perikanan	95,88
Peningkatan Sumberdaya Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	Tersedianya tenaga PPL bidang Perikanan		

Sumber: Lakip Tahun 2014 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel diatas, dapat menunjukkan bahwa dari APBD Natuna tahun 2014 sebesar Rp.21.869.750.975,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.715.975.293,00. Dikaitkan dengan pencapaian misi dan sasaran yaitu Terwujudnya Sentra-sentra Ekonomi Rakyat dengan anggaran sebesar

Rp.4.037.046.600,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.866.966.816,00 atau sebesar 95,79%. Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.10.923.481.375,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.117.501.660,00 atau sebesar 92,62%. dan Terjaminnya Distribusi dan Pemasaran Hasil Pengolahan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 831.608.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 803.995.300,00 atau sebesar 96,68%. Terciptanya Aktivitas Pembangunan yang sesuai dengan Potensi dan Karakteristik Wilayah dengan anggaran sebesar Rp.2.464.373.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.463.186.530,00 atau sebesar 59,37%. Tersedianya Tenaga PPL Bidang Perikanan dengan anggaran sebesar Rp.3.613.242.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.464.324.987,00 atau sebesar 95,88%.

Tabel 3.11

Capai Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2015

MISI	TUJUAN	SASARAN	CAPAIAN KERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI PERTAMA	Tujuan 1	Meningkatkan Usaha Pemanfaatan dan Pengolahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	87,96
Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Secara Optimal dan Lestari			
MISI KEDUA	Tujuan 2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan	65,05
Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hasil Perikanan			
MISI KETIGA	Tujuan 3	Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Perikanan	98,74
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur			

Sumber: Lakip Tahun 2015 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel diatas, dapat menunjukkan bahwa dari APBD Natuna tahun 2014 sebesar Rp.14.633.223.603,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.277.613.403,00. Dikaitkan dengan pencapaian misi dan sasaran yaitu Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.5.166.744.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.544.588.800,00 atau sebesar 87,96%. Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dengan anggaran sebesar Rp.7.137.407.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.643.002.884,00 atau sebesar 65,05%. Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.2.329.072.603,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.090.021.719,00 atau sebesar 89,74%.

Tabel 3.12

Capai Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016

MISI	TUJUAN	SASARAN	CAPAIAN KERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI PERTAMA	Tujuan 1	Meningkatkan Usaha Pemanfaatan dan Pengolahan	94,48
Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Secara Optimal dan Lestari		Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah	
MISI KEDUA	Tujuan 2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan	100
Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hasil Perikanan		Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	
MISI KETIGA	Tujuan 3	Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Perikanan	98,35
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur		Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah	

Sumber: Lakip Tahun 2016 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel 3.12 diatas, dapat menunjukkan bahwa dari APBD Natuna tahun 2014 sebesar Rp.26.120.264.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.793.069.539,00. Dikaitkan dengan pencapaian misi dan sasaran yaitu Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.23.222.164.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.939.358.465,00 atau sebesar 94,48%. Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menyerap anggaran sebesar Rp. 209.100.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 209.100.000,00 atau sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.2.688.999.900,00 dengan realisasi menyerap anggaran sebesar Rp.2.644.611.078,00 atau sebesar 98,35%.